

**KONTRIBUSI FWK SEBAGAI GERAKAN SOSIAL DALAM
DEMOKRATISASI DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik
Pada Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Andalas*

Oleh :

FIDEL

BP. 06193078



**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat dan “kratia” yang berarti pemerintahan. Demokrasi merupakan sistem yang didambakan oleh hampir setiap insan politik di dunia. ¹

Di Indonesia sendiri, demokrasi lebih banyak terpengaruh dari pemikiran di luar Indonesia. Dengan kata lain dinamika demokrasi Indonesia sebagai praktik dan wacana banyak dipengaruhi oleh perkembangan demokrasi di luar Indonesia. Dapat diketahui perkembangan demokrasi di Indonesia telah terjadi pasang surut sedemikian rupa. Indonesia setidaknya telah melalui empat masa demokrasi dengan berbagai versi. Pertama adalah demokrasi liberal dimasa kemerdekaan, kedua adalah demokrasi terpimpin, ketika Presiden Soekarno membubarkan konstituante dan mendeklarasikan demokrasi terpimpin, ketiga adalah demokrasi Pancasila yang dimulai sejak pemerintahan Presiden Soeharto, keempat adalah demokrasi yang saat ini masih dalam masa transisi.²

Transisi dari pemerintahan non demokratis menuju pemerintahan yang demokratis merupakan sebuah proses yang kompleks dan melibatkan sejumlah tahapan. Transisi menuju demokrasi diawali dengan runtuhnya rezim pemerintahan otoriter seperti transisi yang terjadi di Indonesia, tahapan ini akan diakhiri dengan pembentukan

¹ Demokrasi dan Demokratisasi. AS Penghambat Demokrasi. BIGRAF publishing. Yogyakarta. 2000. Hlm V

² Ibid, Hlm. 12-13

sebuah pemerintahan yang baru berdasarkan pemilihan yang bebas. Namun prosesnya tidak berakhir di situ saja, rezim pemerintahan yang baru sering kali menjadi demokrasi terbatas, lebih demokratis dari pemerintahan yang sebelumnya, namun belum demokratis sepenuhnya. Beberapa tahapan pendalaman tentang demokrasi mungkin dibutuhkan.

Transisi demokrasi di Inonesia pada saat ini dapat dikatakan dalam tahap awal pergerakan menuju kepada demokrasi, lebih khusus lagi transisi tersebut digambarkan sebagai demokrasi yang lemah dan tidak solid dan diterpa masalah-masalah sosial ekonomi yang akut. Satu-satunya solusi yang menorehkan gambaran optimistis adalah proses organisasi mobilisasi massa dalam perjuangan untuk demokrasi telah mencapai derajat yang lebih tinggi dari masa sebelumnya, sehingga mempersulit kembalinya sistem pemerintahan lama yaitunya otoriter.

Isu demokratisasi dan transisi pemerintahan suatu Negara ke bentuk yang lebih demokratis menjadi salah satu dari sekian banyak isu populer di tingkat global. Proses transisi demokrasi di suatu Negara mampu mengundang perhatian banyak pihak, dan mendorong munculnya gerakan-gerakan sosial sebagai bentuk solidaritas dan empati masyarakat terhadap isu tersebut. Dimana gerakan sosial adalah aktivitas sosial berupa gerakan sejenis tindakan sekelompok yang merupakan kelompok informal yang berbetuk organisasi, berjumlah besar atau individu yang secara spesifik berfokus pada suatu isu-isu sosial atau politik dengan melaksanakan, menolak, atau mengkampanyekan sebuah perubahan sosial.³

Kehadiran masyarakat sipil di identifikasi sebagai pilar utama yang dapat membantu kelancaran proses demokratisasi. Kahadiran masyarakat sipil mampu

³ Andi Widjajanto, Farah Monika, Harini Dyah Kusumastuti, Yulida Pangastuti. Transionalisasi masyarakat sipil. Yogyakarta. 2007. Hal 6

memberdayakan individu dalam masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya dan menggerakkan politik ke arah yang lebih partisipatoris. Masyarakat sipil merupakan sebuah ruang publik di mana penduduk dapat melakukan aktifitas-aktifitas politik secara independen terhadap Negara. Masyarakat sipil sendiri terdiri dari berbagai organisasi non pemerintahan seperti gerakan sosial yang mengimbangi Negara untuk tidak mendominasi masyarakat.⁴

Para kaum liberal berpendapat bahwa masyarakat sipil merupakan elemen penggerak yang mendukung proses demokratisasi. Mengacu pada pendapat Larry Diamond, tahap transisi demokrasi masyarakat sipil memiliki peran utama sebagai aktor yang memobilisasi tekanan guna mencapai perubahan politik.

Dewasa ini gerakan sosial (*Sosial movement*) menjadi pokok bahasan yang populer bagi kalangan sosiologi barat. Berbagai gerakan sosial muncul dengan tujuannya masing-masing, seperti gerakan mahasiswa pada tahun 1960an dan 1970an, gerakan lingkungan hidup, gerakan perdamaian dan gerakan solidaritas, dan gerakan perempuan pada tahun 1970an dan 1980an.

Gerakan sosial atau gerakan massa, atau gerakan informal, merupakan fenomena penting dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan bangsa-bangsa. Hampir semua peristiwa besar yang mengubah sebuah tatanan, baik itu dalam konteks politik, ekonomi maupun tatanan sosial, seringkali bermula dan mendapat momentum dari sebuah gerakan sosial. Gerakan sosial ini dalam ranah politik seringkali disebut dengan *people power*. Salah satu contoh adalah perubahan besar yang terjadi di Perancis berawal dari revolusi sosial yang berbentuk gerakan massa yang terkenal dengan sebutan revolusi Perancis. Dari revolusi yang terjadi di Negara ini melalui sebuah

⁴ Ibid. hal 78

gerakan sosial maka Perancis berubah haluan politik dari Negara yang menganut sistem monarki absolute menjadi Negara yang menganut sistem demokrasi.⁵

Menurut Wood dan Jackson gerakan sosial adalah kelompok yang berusaha mengurangi atau mencegah jenis perubahan yang radikal atau reformis. Gerakan sosial mempromosikan tindakan cara merespons terhadap suatu kelompok populasi atau isu sosial tertentu. Sistem kusus yang ditargetkan dalam perubahan oleh gerakan sosial adalah sistem politik. Gerakan sosial sering berkembang ketika protes (mobilisasi massa) meledak sebagai akibat dari suatu penambahan penindasan/penekanan atau ketika perubahan yang besar-besaran dan tidak seimbang di dalam sistem politik atau sosial terjadi. Para pengunjuk rasa lokal dapat menarik perhatian atas penindasan yang meluas, ketika para pengunjuk rasa itu memperoleh dukungan dan empati khalayak ramai yang luas, suatu gerakan sosial pun dapat berkembang. Gerakan sosial dapat dikatakan berhasil apabila tujuan yang dikembangkannya diterima sebagai norma politik dan sosial yang baru.⁶

Escobar dan alvarez (1992) dalam pengamatannya terhadap gerakan sosial menemukan bahwa gerakan sosial itu beralih dari perjuangan kelas ekonomi yang terbatas menuju ke transformasi sosial yang lebih luas. Mereka menyatakan gerakan sosial tidak dapat didefinisikan semata-mata dalam pengertian strategi ekonomi dan sosial, gerakan sosial itu juga harus di tempatkan dalam domain politik dan kultural. Mereka berpendapat bahwa teori-teori tentang gerakan sosial justru melihat gerakan sosial sebagai usaha untuk menghasilkan transformasi mendasar dalam hakikat praktik politik. Berdasarkan analisis dan pengamatan mereka, dipahami bahwa untuk menilai

⁵ Novi Andriyanthi. *Aktivisme Gemkara-BP3KB dan pengaruhnya dalam mewujudkan Kabupaten Batu Bara*. 2009. Skripsi FISIP-USU.

⁶ Albert R. Robert & Gilbert. *Buku Pintar Pekerja Sosial*, Jilid 2. Jakarta. Gunung Mulia. 2009. Hal. 246-247

dampak gerakan sosial maka gerakan sosial harus di tempatkan dalam konteks proses demokratisasi yang sangat luas. Proses demokratisasi ini merupakan proses transformasi sosial atas aspek-aspek kultural, sosial, ekonomi dan politik maupun aspek kehidupan lainnya.⁷

Di Indonesia, kontribusi gerakan sosial dalam sebuah proses demokrasi juga sangat penting. Tidak terlalu berlebihan pula jika dikatakan bahwa gerakan sosial merupakan bagian terpenting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia sendiri muncul tidaklah semata-mata hanya karena gerakan bersenjata, tetapi juga dari gerakan sosial yang muncul dari manifestasi dan kesadaran sejumlah kaum muda. Gerakan inilah yang memaksa Ir. Soekarno dan Hatta memproklamkan kemerdekaan Indonesia. Sejak masa kemerdekaan tersebut, seakan-akan gerakan sosial menjadi sebuah senjata utama bagi setiap perubahan. Seperti tumbangny pemerintah orde lama karena sebuah gerakan sosial dan tumbangny pemerintah orde baru juga karena adanya sebuah gerakan sosial yang disebut dengan reformasi.⁸

Pencapaian demokratisasi harus ada sebuah kontribusi dari gerakan sosial. Artinya proses demokratisasi di Indonesia saat ini harus diperluas ke masyarakat, didalam proses demokratisasi tersebut harus ada keikutsertaan dari masyarakat itu sendiri, gerakan ini bisa di salurkan melalui gerakan sosial yang ada dalam masyarakat.

Kontribusi gerakan sosial dalam proses demokratisasi juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia, seperti di kota Padang Sumatera Barat. Di kota Padang terdapat sebuah organisasi sosial yang bernama Forum Warga Kota (FWK) yang di ketuai oleh H. Afrizal, SE, BAc.

⁷ Mansour Fakhri. Masyarakat sipil untuk transformasi sosial. Yogyakarta. INSISTPress. 2010. hlm. 42-43

⁸ [Http://www.chaidir.com](http://www.chaidir.com). Diakses pada tgl 11 mei 2011

FWK dapat dikatakan sebagai gerakan sosial karena, FWK berkembang dari akibat suatu penindasan atau penekanan yang dilakukan oleh pemerintahan kota Padang. Gerakan sosial ini didukung oleh masyarakat dan mendapatkan empati dari pedagang yang dapat dikatakan sebagai kelompok lemah. Pada awal berdirinya, FWK sering melakukan aksi untuk memperjuangkan hak-hak rakyat dan memprotes kebijakan pemerintahan kota Padang terkait hal-hal yang berhubungan dengan Pasar Raya. Pada dasarnya gerakan FWK merupakan ekspresi akan protes terhadap keadaan sosial yang tidak adil atau berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemko Padang terkait dengan hal-hal Pasar Raya yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat banyak.

FWK beranggotakan para pedagang Pasar Raya yang dipimpin dan dikendalikan oleh elite yang umumnya berpendidikan tinggi dan mempunyai pengaruh yang cukup kuat di kota Padang. Forum Warga Kota (FWK) Padang lahir dari kesadaran betapa kezaliman hanya bisa dilawan secara bersama-sama. Setelah lelah melalui perjuangan yang panjang menghadapi keangkuhan penguasa Kota Padang melalui berbagai upaya konstitusional, pedagang pasar raya Padang yang menggabungkan diri ke dalam Aliansi Pedagang Pasar Raya (APPR) Padang, memperluas jaringan dengan melahirkan Forum yang dinamakan Forum Warga Kota Padang. FWK bergerak pada bidang advokasi kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan kota Padang. Kini keanggotaanya tidak lagi hanya Pedagang Pasar Raya Padang, tetapi juga korban tindakan sewenang-wenang Pemko Padang yang lainnya seperti, Warga Korban Gempa Tahun 2007 (bantuannya tidak disalurkan oleh Pemko Padang), Warga Teluk Sirih (Korban kasus pencaplokan paksa tanah), Warga Kuraio Pagang (Korban Kasus pencaplokan paksa tanah), Warga Pasia Nan Tigo (Korban kasus manuggal Jalan BSD II).⁹

⁹ Indowarta.com. diakses pada tanggal 6 Januari 2011 jam 21.30. .

B. Rumusan Masalah

Di kota Padang terdapat sebuah gerakan sosial yang bernama Forum Warga Kota (FWK) yang di ketuai oleh H. Afrizal,SE, BAc. Forum Warga Kota (FWK) Padang lahir dari kesadaran betapa kezaliman hanya bisa dilawan secara bersama-sama. Banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gerakan sosial ini untuk memperjuangkan hak-hak rakyat dan memprotes keras kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Padang. Hal tersebut dapat dilihat dalam pernyataan sikap yang disampaikan oleh FWK kepada pemerintahan kota Padang dalam aksi unjuk rasa yang di lakukan pada tanggal 4 Januari 2010, yang menyatakan bahwa:¹⁰

1. Menolak tempat perelokasian pedagang korban gempa ditempatkan di seputaran jalan Pasar Raya Padang dan mendesak Pemko Padang untuk memindahkan relokasi tersebut.
2. Mendesak pemerintahan kota padang untuk membangun kembali pasar yang rusak akibat gempa bumi dengan dana APBD atau APBN dan tidak melibatkan investor atau diswastanisasikan.
3. Fungsikan kembali terminal angkutan kota di areal SPR.
4. Usut tuntas kasus pencaplokan paksa tanah masyarakat Teluk Sirih yang terindikasi telah terjadi praktik KKN.
5. Usut tuntas kasus pencaplokan paksa tanah masyarakat Kuaro Pagang yang nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan keputusan pengadilan negri Padang.
6. Usut tuntas manunggal jalan BSD pasia nan tigo yang terindikasi telah terjadi praktik KKN.

¹⁰ Arsip FWK

7. Usut tuntas korupsi materisasi PJU yang diduga merugikan Negara dengan nilai proyek sebesar 32 miliar.
8. Usut tuntas dana bantuan korban gempa untuk warga Lapai tahun 2007 yang tidak disalurkan.

Dari hal yang dilakukan dan dituntut oleh FWK tersebut, dapat ditarik sebuah rumusan masalah yaitu: Apa saja kontribusi FWK sebagai gerakan sosial dalam proses demokratisasi di kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Tujuan umum penelitian adalah untuk mendeskripsikan kontribusi FWK sebagai gerakan sosial dalam demokratisasi di kota Padang.
- b. Tujuan khusus penelitian adalah untuk mendeskripsikan tipe elite forum warga kota dalam gerakan sosial di kota Padang.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

B. Kesimpulan

Ada beberapa fungsi gerakan sosial dalam proses demokratisasi yaitu , (1). Fungsi pendidikan politik yang dilakukan oleh gerakan masyarakat sipil melalui pemberian informasi mengenai nilai-nilai demokrasi dan partisipasi publik dapat meningkatkan kesadaran rakyat terhadap proses demokrasi yang tengah berlangsung, (2). Gerakan sosial masyarakat sipil ini dapat memunculkan isu-isu yang perlu didiskusikan. Misalnya isu tentang HAM, kemiskinan, lingkungan agar dapat disuarakan kepada pemerintahan, (3). Memobilisasi masa untuk memaksa sebuah pemerintah lebih transparan dalam menjalankan pemerintahan, (4). Melakukan pemantauan terhadap pemerintah. Dilakukan dengan pemantauan terhadap implementasi dan akibat yang ditimbulkan dari sebuah kebijakan. Gerakan sosial dapat mendorong otoritas di tingkat global agar lebih bertanggungjawab terhadap publik atas tindakan dan kebijakan yang telah di ambilnya.

Dari penelitian yang peneliti lakukan, dapat ditarik kesimpulan yaitu FWK selaku gerakan sosial belum banyak berkontribusi terhadap proses demokratisasi di kota Padang, dapat dikatakan FWK hanya berkontribusi dalam hal mobilisasi masa yang mana itupun tidak terlalu efektif dalam perkembangannya. Selain fungsi mobilisasi masa yang kurang efektif, fungsi pendidikan politik, isu-isu politik dan pemantauan terhadap kebijakan pemerintahan pun kontribusi FWK hanya terlihat di awal jalannya Gerakan sosial ini. Pada saat ini kontribusi tersebut tidak terlihat dan bahkan hal-hal yang dilakukan oleh FWK yang bertentangan dengan masyarakat pedagang.

Persaingan untuk mendominasi dan mengedepankan kepentingan pribadi terjadi di dalam elite FWK. Namun mobilisasi massa yang dilakukannya terus berlangsung, sehingga menurut Burton, Gunther, dan Higley jika tidak ada penyesuaian antara elite, sementara mobilisasi massa oleh elite tetap berlangsung maka akan menimbulkan polarisasi elite dan massa. Yang mana bisa menimbulkan demokrasi yang tidak terkonsolidasi dan demokrasi yang semu.

DAFTAR PUSTAKA

- Clymer Roode, Carlton dkk. 1993. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta. Rajawali Perss.
- Den Doel, Van. 1988. *Demokrasi dan Teori Kemakmuran*. Jakarta. Erlangga
- Fakih, Mansour. 2010. *Masyarakat sipil dan Transformasi sosial*. Yogyakarta. InsistPress
- Firmanzah. 2008. *Mengelola Partai Politik, Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta. Yayasan Obor.
- Gaffar, Afan. 2006. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta. Pustaka pelajar.
- Held, David. 2006. *Demokrasi(sejarah, praktik, dan dinamika pemikiran)*. Malang. PaCID's dan avvarroes press.
- Jatmika, Sidik. 2000. *AS Penghambat Demokrasi*. Yogyakarta. bigraf publishing.
- Lofland, John. 2003. *Protes, studi tentang perilaku kolektif dan gerakan sosial*. Yogyakarta. INSIST.
- M, Siahaan, Hotman. 1997. *Memahami Gerakan Sosial Rakyat*. Jakarta. Ire Press.
- Paul Johnson, Doyle. 1983. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*. Jakarta.Gramedia.
- Ravich, Diane dan Thernstrom, Abigail. *Teori Demokrasi Klasik dan Moderen*. 2005. Jakarta. Yayasan Obor.
- R, Robert, Albert dan Gilbert. 2009. *Buku Pintar Pekerja Sosial, jilid 2*. Jakarta. Gunung Mulia
- Silaen, Vicktor. 2003. *Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta. INSIST.
- Sorensen, George. 2003. *Demokrasi dan demokratisasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Widjajanto, Andi. *Transionalisasi masyarakat sipil*. Yogyakarta. LKiS
- Winarmo Budi. 2002. *The Roles Of Village Organisation In Development*. Yogyakarta.